

STRATEGI PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2019

Felika Andriani Saputri (14010116120010)

Email: felikaandrianis@gmail.com

Dosen Pembimbing: Dr. Dewi Erowati, S. Sos, M. Si

Email: dewi.erowati@live.undip.ac.id

**Departemen Politik Dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

ABSTRAKSI

Kabupaten Kebumen beberapa kali telah mendapat peringkat pertama dalam kategori Kabupaten Layak Anak (KLA), di tahun 2019 Kabupaten Kebumen meningkat menjadi peringkat Madya. Sehubungan dengan adanya peningkatan kategori peringkat pada tahun 2019 di Kabupaten Kebumen sebagai Kabupaten Layak Anak, maka penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini berkaitan dengan strategi yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mengembangkan Kabupaten Kebumen sebagai kabupaten layak anak. Penelitian ini menjadi menarik untuk diteliti karena adanya peningkatan kategori peringkat yang diperoleh Kabupaten Kebumen.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Adapun subjek dalam penelitian ini yakni: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, DPRD Kabupaten Kebumen, Forum Anak Kabupaten, Kepala Desa Candi, Kepala Desa Adikarso, SMP N 2 Kebumen, Puskesmas Karanganyar, dan masyarakat.

Hasil penelitian ini mendeskripsikan berbagai hasil temuan di lapangan yang sesuai dengan rencana strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen yakni terjadi peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kapasitas layanan yang ramah anak yakni peningkatan pembentukan forum anak desa, pembentukan sekolah ramah anak dan pembentukan puskesmas ramah anak. Hanya saja peningkatan tersebut tidak disertai dengan adanya berbagai kegiatan yang dapat membuat baik sekolah ramah anak, puskesmas ramah anak, serta forum anak desa terus aktif. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan tersebut hanya sebagai formalitas saja untuk dibentuk.

Dari hasil penelitian ini, peningkatan pembentukan forum anak desa, pembentukan sekolah ramah anak dan pembentukan puskesmas ramah anak harus terus ditingkatkan secara maksimal tidak hanya secara formalitas belaka. Selain itu, perlu ada upaya untuk meningkatkan jumlah anggaran yakni melakukan kerjasama dengan pihak swasta. Kemudian melakukan pelatihan bagi pihak-pihak yang terkait dengan KLA.

Kata Kunci: Strategi, pengembangan, Kabupaten Layak Anak

STRATEGIES FOR DEVELOPING DISTRICT/CITY WORTHY OF CHILDREN IN KEBUMEN DISTRICT 2019

Felika Andriani Saputri

Email : felikaandrianis@gmail.com

Supervisor : Dr. Dewi Erowati, S.Sos, M.Si

Email : dewi.erowati@live.undip.ac.id

Department of Politics and Government FISIP Undip Semarang

ABSTRACT

Kebumen District has been given a number of primary rank in the category of children's Worthy Regency (KLA), in 2019 Kabupaten Kebumen increased to the rank of Madya. Due to the increase in the ranking category in the year 2019 in Kebumen district as the child Worthy district, the research conducted by this researcher relates to the strategy used by the District government of Kebumen in Developing Kebumen District as a child-worthy district. This research became interesting to be researched due to the increase in the ranking category obtained by Kebumen District.

The research uses qualitative, descriptive research methods, with data collection techniques through observation, interviews, and documentation studies. The subject in this research is: the Office of Community Empowerment and village and empowerment of women and child Protection, District DPRD Kebumen, children's Forum district, village head of the temple, head of Adikarso village, SMP N 2 Kebumen, Puskesmas Karanganyar, and society.

The result of this research is describing the findings in the field that is in accordance with the strategic plan of community empowerment and village and empowerment of women and child protection of Kebumen district which is an increase in capacity Institutional and capacity building of child-friendly services that increase the establishment of the Village Child Forum, the establishment of child-friendly schools and the establishment of child friendly puskesmas. Its just that the increase is not accompanied by a variety of activities that can make both child-friendly schools, child-friendly puskesmas, and village childrens's forums continue to be active. This shows that the increase is only a formality to be formed.

From the results of this research, increased establishment of a village child forum, the establishment of child-friendly schools and the establishment of child friendly puskesmas should continue to be maximally enhanced not only formalities mere. In addition, there needs to be an effort to increase the amount of budget that is doing cooperation with private parties. Then conduct training for the parties related to KLA.

Keywords: strategy, development, District worthy children

A. PENDAHULUAN

Dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dapat dikatakan bahwa mereka masih dalam kategori yang rentan terhadap masalah-masalah sosial.

Anak adalah harapan setiap orangtua dan keluarga. Dalam cakupan yang lebih luas anak adalah harapan bangsa dan negara bahkan dunia dimasa yang akan datang.¹ Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama untuk memberikan dan memenuhi hak-hak anak dengan mewujudkan dunia yang layak untuk mereka.

Pemerintah Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak-hak anak pada tahun 1990 melalui Keppres Nomor 36 tahun 1990 kemudian mengesahkan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002. Dengan meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA), Indonesia menyepakati bahwa seluruh hak anak adalah hak asasi manusia seorang anak yang setara pentingnya dan bahwa Indonesia akan melakukan segala upaya untuk memastikan seluruh hak tersebut dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Sejak diratifikasi Konvensi Hak Anak, pemerintah mulai menyusun berbagai strategi untuk membuat kebijakan maupun program yang bertujuan untuk mewujudkan hak-hak anak. Salah satunya adalah Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak.² Menurut Peraturan Menteri tersebut, Kabupaten/Kota Layak Anak atau biasa disebut dengan KLA merupakan kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

¹Devi Ayu Rizki, Sri Sulastri, dan Maulana Irfan. "Pemenuhan Hak Partisipasi Anak Melalui Forum Anak Dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Bandung (Studi Kasus Forum Komunikasi Anak Bandung)". *Share Social Work Jurnal* Vol. 5 No. 1. Hlm. 11-14

²Ibid

Setiap kabupaten/kota dapat dikategorikan menjadi KLA jika kabupaten/kota tersebut dapat memenuhi hak anak yang diukur dengan indikator KLA. Indikator tersebut meliputi penguatan kelembagaan dan klaster hak anak. Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, terdapat lima klaster hak anak yakni: hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; serta perlindungan khusus.

Kabupaten Kebumen sudah beberapa kali mendapat peringkat pertama dalam penilaian Kabupaten Layak Anak (KLA), kini di tahun 2019 meningkat mendapat peringkat Madya. Untuk tahun 2019 Kabupaten Kebumen mendapat peringkat Madya dengan perolehan nilai 628. Jika ingin meningkat lagi menjadi Nindya maka harus mencapai nilai 700. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Dispermades Marlina Indriyaningrum, SKM. M.Kes mengatakan ada 9 komponen kunci disetiap indikator dalam Kabupaten Layak Anak diantaranya Perda tentang KLA, dukungan anggaran, adanya Forum Anak, Keterlibatan lembaga masyarakat, Kemitraan dengan dunia usaha, kemitraan dengan media dan inovasi dalam KLA. Namun kelemahan kita adalah pada pendokumentasian kegiatan yang sudah dilaksanakan.³

Sehubungan dengan adanya peningkatan kategori peringkat pada tahun 2019 di Kabupaten Kebumen sebagai Kabupaten Layak Anak, maka penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini berkaitan dengan strategi yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mengembangkan Kabupaten Kebumen sebagai kabupaten layak anak, penelitian ini begitu penting dilakukan karena perlunya strategi yang digunakan dalam mengembangkan suatu daerah menjadi daerah yang layak untuk anak-anak seperti Kabupaten Kebumen.

³ <https://www.kebumenkab.go.id/index.php/public/news/detail/4912> diakses 08 November 2019 pukul 18.56

B. METODE

PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kebumen, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif yang terdiri dari: observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.

C. PEMBAHASAN

Berdasarkan pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen mengenai Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Perangkat Daerah yang Berkaitan dengan Kabupaten Layak Anak Tahun 2016 – 2021 yakni strategi yang digunakan untuk mencapai Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kebumen yakni:

1. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan, berbagai regulasi dan kebijakan pemenuhan hak anak.
2. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pemenuhan hak anak di daerah.
3. Meningkatkan kapasitas dan kuantitas lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak yang ramah anak.
4. Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak melalui pelembagaan kabupaten layak anak.
5. Memperkuat lembaga/ jejaring pemenuhan hak anak di daerah untuk peningkatan efektifitas dan efisiensi pemenuhan hak anak.
6. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pemenuhan hak anak untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat daerah

a. Anggaran Pelaksanaan Kabupaten Layak Anak Di Kabupaten Kebumen

Dalam hal penganggaran untuk pemenuhan hak anak berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dikatakan bahwa anggaran untuk penyelenggaraan Kebijakan Kabupaten Layak Anak bersumber dari APBD. Anggaran dengan jumlah Rp 84.000.000,00 (delapan puluh empat juta rupiah) digunakan untuk memfasilitasi pembentukan forum anak sebesar Rp 75.200.000,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus ribu rupiah). Kemudian anggaran dengan jumlah Rp 8.800.000,00 (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) digunakan untuk kegiatan Sekolah Ramah Anak dan Kegiatan Puskesmas Ramah Anak.

b. Program/Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang pelaksanaan Kabupaten Layak Anak

Dalam upaya melaksanakan kebijakan Kabupaten Layak anak, dibutuhkan adanya program-program yang dapat mendukung terlaksanakannya Kabupaten Layak anak. Pada Tahun 2019 Kabupaten Kebumen melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah melaksanakan kegiatan Sekolah Ramah Anak, terdapat 5 (lima) sekolah yakni SD N 1 Kutosari, SD N 4 Kutosari, SMP N 3 Gombang, MTS N 6 Kaleng Puring serta pada tanggal 7 November 2019 mendeklarasikan SMP Negeri 2 Kebumen sebagai sekolah yang berkomitmen untuk menjadi Sekolah Ramah Anak. Pada hari itu SMP N 2 Kebumen melaksanakan kegiatan sehari belajar di ruang kelas. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk mendukung pengembangan sekolah ramah anak. Kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mewujudkan SMP Negeri 2 Kebumen sebagai Sekolah Ramah Anak yakni sekolah yang aman, bersih, sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup. Selain itu, Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi dan perlakuan salah lainnya. Sekolah Ramah Anak juga dapat mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan. Adapun tanggapan dari Ibu Arin selaku Wakil Kepala Sekolah SMP N 2 Kebumen yakni:

“iya jadi tahun 2019 kemarin kita sudah mulai melaksanakan atau menjadi Rintisan Sekolah Ramah Anak sudah dideklarasikan juga waktu itu, terus anak-

anak dari SMP N 2 Kebumen ini dimasukkan kedalam Forum Anak yang diwakilkan oleh anggota OSIS.”⁴

SMP 2 Kebumen menerapkan program sekolah ramah anak dengan melibatkan siswa untuk ikut berpartisipasi dalam pembuatan peraturan yang memang ditujukan untuk siswa tersebut. Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Arin selaku Wakil Kepala Sekolah SMP N 2 Kebumen yakni:

“....Misalnya saja gini mba, misal peraturan, kita buat peraturan bersama anak-anak dengan melibatkan siswa tetapi diwakilkan oleh OSIS seperti itu, juga aturan-aturan yang istilahnya disiplin positif, kita kan harus memberitahu anak tentang sanksi kita beri tahu sebelumnya, kaya semisal terlambat dan sebagainya. Pokoknya kita ada keterlibatan stakeholder lah.”⁵

Penerapan Sekolah Ramah Anak pada intinya adalah menerapkan kegiatan yang tidak membahayakan untuk anak serta membuat anak nyaman dalam melaksanakan pembelajaran.

“sebenarnya kegiatannya itu *include* atau masuk dalam pembelajaran, misalnya ada fasilitas yang ramah anak, kita kurangi sesuatu yang dapat membuat mereka cedera misalnya. Kemudian sarana sanitasi misalnya, kamar mandi itu juga yang tidak membahayakan. Intinya lingkungan belajarnya harus nyaman.”⁶

Selain terdapat Sekolah Ramah Anak, juga terdapat Puskesmas Ramah Anak. Di Kabupaten Kebumen dari 35 Puskesmas terdapat Puskesmas Ramah Anak pada tahun 2019 yakni:

1. Puskesmas Karanganyar
2. Puskesmas Ambal 1
3. Puskesmas Rowokele
4. Puskesmas Pejagoan
5. Puskesmas Kebumen 3
6. Puskesmas Kebumen 2
7. Puskesmas Ayah 1
8. Puskesmas Alian
9. Puskesmas Petanahan
10. Puskesmas Kutowinangun

⁴ Wawancara Ibu Arin, Wakil Kepala Sekolah SMP N 2 Kebumen. Di SMP N 2 Kebumen pada Hari Senin, 10 Februari 2020 Pukul 10.30 WIB.

⁵ Ibid

⁶ Ibid

Adapun fasilitas yang diberikan oleh puskesmas tersebut diantaranya adalah ruang tunggu khusus anak, hal ini juga disampaikan oleh Ibu Pangestu selaku Bidan di Puskesmas Karanganyar yakni:

“fasilitas, kita memberikan satu tempat atau satu ruangan khusus untuk anak-anak bermain sambil menunggu gitu disebelah pojok sana, nanti saya antar kesana mba.”⁷

c. Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlatih KHA

Dalam upaya pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kebumen dibutuhkan adanya sumber daya manusia yang dilatih dalam rangka Konvensi Hak Anak. Dalam upaya tersebut pemerintah melakukan pelatihan Konvensi Hak Anak kepada para OPD yang terkait. Pada tanggal 12 September 2019 diadakan kegiatan bimbingan teknis bagi pendidik dan tenaga kependidikan Kabupaten Kebumen yang dihadiri oleh perwakilan guru-guru maupun Kepala Sekolah yang ada di Kabupaten Kebumen dengan jumlah 30 (tiga puluh) peserta. Dalam bimbingan teknis tersebut salah satunya membahas mengenai bagaimana seharusnya seorang tenaga pendidik memberikan pendidikan kepada siswa-siswanya seperti bagaimana memberikan nasihat ketika siswanya tidak masuk sekolah karena membolos. Dalam peragaan tersebut, terdapat berbagai cara menasihati dan juga terdapat berbagai respon yang ditimbulkan dari nasihat-nasihat yang diberikan.

Selain memberikan bimbingan teknis kepada tenaga pendidik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga memberikan bimbingan teknis Konvensi Hak Anak pada tenaga kesehatan. Kegiatan bimbingan teknis KHA bagi tenaga kesehatan di Kabupaten Kebumen dilaksanakan pada tanggal 13 September 2019. Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan dari berbagai tenaga kesehatan yang ada di masing-masing puskesmas yang ada di Kabupaten Kebumen dengan jumlah 30 (tiga puluh) peserta.

⁷ Wawancara Ibu Pangestu, Bidan Puskesmas Karanganyar. Di Puskesmas Karanganyar pada Hari Senin, 10 Februari 2020 Pukul 09.00 WIB.

d. Jumlah Kelompok Anak

Kabupaten Kebumen memiliki kelompok anak yakni yang disebut dengan Forum Anak. Mengenai jumlah kelompok anak tersebut, dijelaskan oleh Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen yakni sebagai berikut:

“Kelompok anak ada satu forum anak kabupaten, 26 kecamatan ini ada 26 forum anak kecamatan, untuk desa-desa belum semua, tapi untuk tahun ini sudah bertambah. Kalau forum anak desa itu 5 persen aja belum ada, waktu itu baru sekitar 10 desa tapi tahun ini sudah bertambah jadi 20an atau sekitar 26 desa kalau tidak salah.”⁸

Berdasarkan penjelasan dari Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga di atas, menunjukkan bahwa di Kabupaten Kebumen terdapat kelompok anak yakni:

Tabel 1.1
Jumlah Kelompok Anak di Kabupaten Kebumen Tahun 2019

No	Kelompok Anak	Jumlah
1.	Forum Anak Kabupaten	1
2.	Forum Anak Kecamatan	26
2.	Forum Anak Desa	26
Jumlah		53

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen

Selain forum anak kabupaten dan forum anak kecamatan, Kabupaten Kebumen juga sudah membentuk forum anak desa, yakni pada tahun 2019 dari 449 desa dan 11 kelurahan, sudah terbentuk 26 forum anak desa di Kabupaten Kebumen. Forum anak desa tersebut adalah Forum Anak Desa Candi Kecamatan Karanganyar, Forum Anak Desa Adikarso dan Kutosari Kecamatan Kebumen, Forum Anak Desa Gebangsari Kecamatan Klirong, Forum Anak Desa Kebonsari Kecamatan Petanahan, Forum Anak Desa

⁸Wawancara Sugihartana, Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen. Di Kantor Dispermade P3A Kabupaten Kebumen pada Hari Rabu 11 Desember 2019 Pukul 07.30 WIB.

Tukinggedong Kecamatan Puring, Forum Anak Desa Wadasmalang Kecamatan Krangsambung, Forum Anak Desa Kedunggong Kecamatan Sadang, Forum Anak Desa Kuwayuhan Kecamatan Pejagoan, Forum Anak Desa Tlogodepok Kecamatan Mirit, Forum Anak Desa Pesuningan Kecamatan Prembun, Forum Anak Desa Krakal Kecamatan Alian, Forum Anak Desa Sidoharum Kecamatan Sempor, Forum Anak Desa Demangsari Kecamatan Ayah, Forum Anak Desa Arjowinangun Kecamatan Buluspesantren, Forum Anak Desa Ambalresmi Kecamatan Ambal, Forum Anak Desa Tanjungsari Kecamatan Kutowinangun, Forum Anak Desa Poncowarno Kecamatan Poncowarno, Forum Anak Desa Mrentul Kecamatan Bonorowo, Forum Anak Desa Pejengkolan Kecamatan Padureso, Forum Anak Desa Logandu Kecamatan Karanggayam, Forum Anak Desa Kemujan Kecamatan Adimulyo, Forum Anak Desa Adiwarno Kecamatan Buayan, Forum Anak Desa Wero Kecamatan Gombang, Forum Anak Desa Wagirpandan Kecamatan Rowokele, Forum Anak Desa Sidoagung Kecamatan Sruweng.

Mengenai kegiatan Forum Anak di Kabupaten Kebumen, Forum Anak Kabupaten Kebumen melaksanakan berbagai kegiatan seperti forum anak goes to school, kampanye kekerasan pada anak, dolanan tradisional. Sedangkan kegiatan forum anak kecamatan dan desa sampai tahun 2019 baru melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan kepemudaan.

e. Analisis Strategi Pengembangan Kabupaten Layak Anak Di Kabupaten Kebumen Tahun 2019

Berdasarkan pada hasil temuan di lapangan, dengan melihat strategi yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen. Pelaksanaan strategi yang tercantum dalam rencana strategis memang sudah dijalankan yakni: pada penguatan kelembagaan, terdapat susunan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kebumen. Selain itu juga terdapat 1 Forum Anak Kabupaten, 26 Forum Anak Kecamatan dan 26 Forum Anak Desa.

Pada peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan, terdapat Komisi Perlindungan Anak Desa/Kelurahan (KPAD/K), hanya saja kegiatannya masih tertuju pada sosialisasi-sosialisasi biasa. Selain itu, terdapat fasilitasi atau pembentukan Forum Anak

Desa dari yang sebelumnya hanya berjumlah 2 Forum Anak Desa, pada tahun 2019 sudah terbentuk 26 Forum Anak Desa, sehingga terdapat peningkatan jumlah Forum Anak Desa. Kemudian terdapat pula 2 Desa Ramah Anak yakni Desa Candi Kecamatan Karanganyar dan Desa Adikarso Kecamatan Kebumen.

Pada peningkatan kapasitas penyedia layanan yang ramah anak, terdapat pembentukan Puskesmas Ramah Anak yakni dari 35 puskesmas yang ada di Kabupaten Kebumen, pada tahun 2019 terdapat 10 pembentukan puskesmas ramah anak, kemudian terdapat pula pembentukan sekolah ramah anak yang pada tahun 2019 terdapat 5 sekolah ramah anak. Namun, dalam pembentukan puskesmas ramah anak yang peneliti temukan di lapangan, puskesmas yang dikatakan menginisiasi menjadi puskesmas ramah anak tidak memperlihatkan adanya puskesmas yang ramah untuk anak. Hal ini diketahui dari penelitian di lapangan bahwa puskesmas-puskesmas tersebut hanya memberikan fasilitas seperti ruang tunggu untuk anak yang mana pembuatan ruang tunggu tersebut tidak direncanakan secara matang yakni hanya memanfaatkan ruangan pojok yang kosong seperti di Puskesmas Karanganyar dan Puskesmas Pejagoan.

Selain itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga berupaya melakukan pendampingan atau bimbingan teknis dalam program, kegiatan dan anggaran yang peduli anak, seperti bimbingan teknis yang dilakukan untuk tenaga pendidik. Kegiatan bimbingan teknis bagi pendidik dan tenaga kependidikan Kabupaten Kebumen yang dihadiri oleh perwakilan guru-guru maupun Kepala Sekolah yang ada di Kabupaten Kebumen dengan jumlah 30 (tiga puluh) peserta. Dalam bimbingan teknis tersebut salah satunya membahas mengenai bagaimana seharusnya seorang tenaga pendidik memberikan pendidikan kepada siswa-siswanya seperti bagaimana memberikan nasihat ketika siswanya tidak masuk sekolah karena membolos. Dalam peragaan tersebut, terdapat berbagai cara menasihati dan juga terdapat berbagai respon yang ditimbulkan dari nasihat-nasihat yang diberikan. Selain memberikan bimbingan teknis kepada tenaga pendidik, bimbingan teknis Konvensi Hak Anak juga diberikan untuk tenaga kesehatan. Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan

dari berbagai tenaga kesehatan yang ada di masing-masing puskesmas yang ada di Kabupaten Kebumen dengan jumlah 30 (tiga puluh) peserta.

Sosialisasi Perlindungan anak di sekolah, terlaksananya sosialisasi mengenai perlindungan anak dilakukan oleh Forum Anak Kabupaten yakni dengan kegiatan forum anak goes to school dan kampanye stop kekerasan terhadap anak. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, Forum Anak berusaha mendatangi sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kebumen untuk memberikan sosialisasi yang terkait dengan perlindungan anak.

Dengan demikian, strategi yang terdapat pada rencana strategis sudah dilaksanakan, namun masih terdapat berbagai kekurangan dalam pelaksanaannya diantaranya:

1. Peningkatan Kapasitas kelembagaan, peningkatan pembentukan Forum Anak Desa tidak disertai dengan adanya kegiatan setelah dibentuknya Forum Anak Desa.
2. Penyedia layanan yang ramah anak, dalam peningkatan penyedia layanan yang ramah anak terdapat puskesmas yang ramah anak. Namun, dalam pelaksanaannya tidak terdapat hal yang menunjukkan ramah anak, yang ada hanya tempat bermain anak seperti ruang tunggu khusus anak.
3. Pendampingan atau bimbingan teknis yang dilakukan terkait dengan program peduli anak hanya bimbingan teknis untuk tenaga pendidik dan tenagakesehatan.

Dengan demikian, pengembangan Kabupaten Layak Anak yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan rencana strategis dapat dikatakan terjadi peningkatan. Peningkatan yang terjadi yakni dalam hal peningkatan kapasitas kelembagaan dan juga penyedia layanan yang ramah untuk anak. Hanya saja peningkatan tersebut tidak disertai dengan kegiatan-kegiatan yang dapat membuat suatu kelompok seperti forum anak dapat terus aktif berpartisipasi setelah dibentuk. Hal ini menunjukkan bahwa pembentukan baik Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak dan Forum Anak Desa dibentuk hanya sebagai formalitas saja.

f. Faktor Pendukung

Dalam kebijakan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak perlu adanya dukungan dan kerjasama dengan instansi lain. Diperlukan adanya kerjasama untuk keberhasilan Kabupaten Layak Anak. Pemerintah Kabupaten Kebumen melaksanakan penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Namun, Dinas tersebut tidak bekerja sendirian melainkan melibatkan instansi-instansi lain baik dari eksekutif maupun legislatif. Pemerintah berupaya untuk menjalin komunikasi yang baik dengan berbagai aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Aktor-aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak anak disebut dengan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah sebuah lembaga koordinatif pemerintah Kabupaten Kebumen yang beranggotakan perwakilan dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orangtua dan yang terpenting adalah melibatkan anak (forum anak).

Dalam pengembangan Kabupaten Layak Anak, Gugus Tugas menjadi hal yang penting dan dilegalkan melalui surat keputusan bupati ataupun walikota. Dengan adanya pembentukan Gugus Tugas dan legislasi tersebut, maka pelaksanaan Kabupaten Layak Anak dapat berjalan. Di Kabupaten Kebumen, terdapat Keputusan Bupati Kebumen Nomor 463.1/ 440 Tahun 2017 tentang pembentukan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Kebumen periode 2017-2021. Dengan adanya Susunan Keanggotaan Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Di Kabupaten Kebumen Periode 2017-2021 dapat diketahui bahwa yang menjadi *leader* dari terlaksananya Kabupaten Layak Anak adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kemudian pemerintah juga menjaga hubungan dengan berbagai organisasi dalam upaya penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Hal tersebut dilakukan dengan melibatkan

Forum Anak Kabupaten Kebumen dalam berbagai kegiatan anak sebagai wujud partisipasi anak. Hal tersebut juga disampaikan oleh Wakil Ketua Forum Anak Kabupaten Kebumen yakni:

“...jadi setiap ada kegiatan pertemuan atau rapat koordinasi dengan dinas-dinas terkait itu forum anak selalu diundang agar dapat menyuarakan pendapat anak dan agar tahu rencana-rencananya seperti apa.”⁹

Adapun bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Forum Anak Kabupaten terkait dengan kebijakan Kabupaten Layak Anak adalah Forum Anak melakukan kegiatan forum anak goes to school dan kampanye stop kekerasan terhadap anak serta dolanan tradisional. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan beberapa bentuk kegiatan sebagai wujud dukungan dari Forum Anak Kabupaten Kebumen dalam penyelenggaraan kebijakan Kabupaten Layak Anak.

g. Faktor Penghambat

Dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen, pada tahun 2019 berupaya meningkatkan pembentukan forum anak desa dari yang sebelumnya hanya berjumlah 2 forum anak desa, pada tahun 2019 meningkat menjadi 26 forum anak desa. Namun, peningkatan pembentukan forum anak desa tersebut tidak disertai dengan adanya kegiatan yang dapat membuat forum anak desa terus aktif di masyarakat.

Kemudian mengenai pembentukan puskesmas ramah anak, pada tahun 2019 sudah terbentuk 10 puskesmas ramah anak. Namun, pada kenyataannya dilapangan pembentukan puskesmas ramah anak hanya formalitas saja. Dikatakan hanya sebagai formalitas karena dari temuan peneliti, hanya terdapat tempat bermain yang ditunjukkan kalau puskesmas tersebut adalah puskesmas ramah anak.

Selain itu, hal lain yang menjadi penghambat dalam penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak adalah terbatasnya ketersediaan anggaran. Seperti yang sudah diketahui bahwa anggaran Kebijakan Kabupaten Layak Anak yang digunakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten

⁹ Wawancara Helmi Aziz Wijaya, Wakil Ketua Forum Anak Kabupaten Kebumen. Di Alun-alun Kebumen pada Hari Kamis, 05 Desember 2019 Pukul 12.45

Kebumen pada tahun 2019 yakni Rp 84.000.000 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

D. KESIMPULAN

Berdasarkan data dan fakta yang ditemukan, secara keseluruhan dapat peneliti simpulkan bahwa dalam rangka mengembangkan Kabupaten Kebumen menjadi Kabupaten Layak Anak, sesuai dengan rencana strategis yang dibuat oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen dapat disimpulkan bahwa:

1. Dengan adanya rencana strategis yang dibuat oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen, terjadi adanya peningkatan dalam mengembangkan Kabupaten Layak Anak. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas penyedia layanan ramah anak. Peningkatan Kelembagaan, yakni terdapat peningkatan jumlah forum anak desa yang sebelumnya hanya berjumlah 2 forum anak desa, pada tahun 2019 meningkat menjadi 26 forum anak desa. Kemudian terkait dengan kapasitas penyedia layanan ramah anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen membentuk puskesmas ramah anak yang pada tahun 2019 berjumlah 10 puskesmas ramah anak. Selain puskesmas ramah anak, juga terdapat sekolah ramah anak yakni pada tahun 2019 terdapat 5 sekolah ramah anak. Hanya saja, pembentukan baik Sekolah Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak dan Forum Anak Desa dibentuk hanya sebagai formalitas saja.
2. Dengan adanya peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas penyedia layanan yang ramah anak yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen tentu hal ini menjadi pendorong untuk dapat mencapai Kabupaten Kebumen menjadi Kabupaten Layak Anak. Namun, dalam peningkatan tersebut juga masih terjadi adanya kekurangan yakni setelah upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen membentuk

forum anak desa, pembentukan tersebut tidak disertai dengan adanya berbagai kegiatan yang dapat membuat forum anak desa terus aktif.

DAFTAR PUSTAKA

Devi, S. M. Pemenuhan Hak Partisipasi Anak Melalui Forum Anak Dalam Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Bandung (Studi Kasus Forum Komunikasi Anak Bandung). *Share Social Work Jurnal*. Vol. 5. No. 1. Hal. 11-14

<https://www.kebumenkab.go.id/index.php/public/news/detail/4912> diakses 08 November 2019 pukul 18.56